

BAB 1

PENDAHULUAN

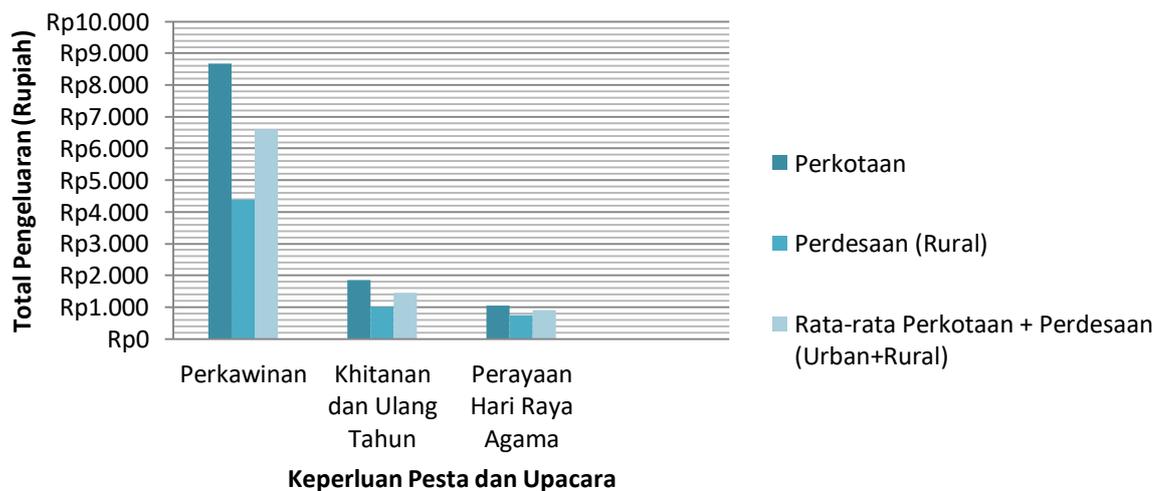
1.1 Latar Belakang Masalah

Pengeluaran sosial yang berhubungan dengan keikutsertaan orang lain berimplikasi sebagai ajang pencarian status. Hubungan sistematis antara pengeluaran sosial dengan perubahan distribusi tatanan pendapatan menjadi lebih tinggi. Hal ini konsisten dengan teori-teori berbasis kompetisi peringkat mencari status, dimana banyak orang meningkatkan pengeluaran untuk berbagai upacara seperti pemakaman, upacara perkawinan dan hadiah sebagai ajang intensifikasi status sosial (Brown, Bulte dan Zhang, 2011). Salah satunya adalah pemberian sinyal status dalam perayaan perkawinan dimana ukuran perayaan menandakan kualitas baru sebuah keluarga pengantin pria dengan begitu status pengantin wanita juga ikut meningkat dengan adanya penyelenggaraan pesta dan upacara tersebut. (Bloch, Rao dan Desai, 2004).

Timbulnya perilaku suatu keluarga untuk meniru keluarga dari tatanan sosial yang lebih tinggi menimbulkan mobilitas sosial (Srinivas, 1989). Perilaku ini telah menjadi gaya hidup untuk banyak orang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Banerjee dan Duflo, (2007) memberikan bukti bahwa konsumsi mencolok yang dilakukan oleh negara berkembang adalah fenomena distribusi positif untuk kesejahteraan pada masyarakat. Distribusi tersebut mengandung nilai positif karena dapat menjadikan pemerataan akan peningkatan gizi untuk orang-orang yang menghadiri perkawinan. Akan tetapi, indikasi nilai simbolik pada perayaan perkawinan diungkapkan sebagian besar individu terkait dengan status sosial dan prestise. Status dan rasa hormat ini diberikan oleh lingkaran atau komunitas dari kelompok sosial individu atau rumah tangga tersebut. (Bloch, Rao dan Desai 2004)

Menghabiskan uang dalam jumlah besar pada perkawinan dipicu oleh norma yang memberikan sinyal komitmen atau dukungan untuk perkawinan menjadi sukses. Karena para tamu undangan akan melihat bagaimana pesta perkawinan itu berjalan. Tradisi pesta perkawinan pada dasarnya menggembirakan, namun seiring dengan peningkatan konsumerisme dan modernisasi justru menjadi beban ekonomi terkait upacara atau pesta perkawinan sangat mahal (Rashad, Osman dan Roudi-Fahimi, 2005). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bloch, Rao dan Desai (2004), menunjukkan bahwa ukuran perayaan dibenarkan sebagai keterpaksakan oleh norma-norma yang berlaku pada masyarakat yang biasanya ditentukan dengan mengamati skala perkawinan terbaru lainnya dalam suatu komunitas di dalamnya.

Persiapan sejak dini sangat penting dilakukan untuk menentukan pengeluaran individu yang terlibat dalam pengelolaan pengeluaran pesta dan upacara perkawinan karena dapat membantu kelancaran penggolongan pengeluaran pesta dan upacara perkawinan (Husin, Azahari & Rahman, 2018). Orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan pengeluaran perkawinan harus mengidentifikasi sumber-sumber untuk memastikan bahwa keuangan saat ini dan masa depan yang memadai serta sesuai dengan perkiraan pengeluaran. Kurangnya inisiatif tentang masalah ini dapat menyebabkan pengeluaran di luar kemampuan individu. Menurut al-Qaradawi (2006), keseimbangan antara pendapatan (dimana dalam penelitian ini menggunakan total pengeluaran) dan pengeluaran penting dalam manajemen pengeluaran individu. Ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan dapat menyebabkan budaya hutang. Saat ini, hutang bukanlah sesuatu yang tidak biasa bagi mereka yang berniat menikah. Sikap berhutang terkait dengan persiapan untuk merencanakan sumber-sumber untuk pengeluaran pesta dan upacara perkawinan demi realisasi berjalannya pesta yang diidamkan.



Gambar 1.1

Rata-Rata Pengeluaran Keperluan Pesta dan Upacara Per Kapita Sebulan (Rupiah) Menurut Jenis Barang Bukan Makanan dan Daerah Tempat Tinggal, Maret 2016

Sumber : Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas), BPS (2016) Buku 1 – Pengeluaran Konsumsi Penduduk Indonesia, Maret

Pengeluaran pengeluaran pesta dan upacara perkawinan di Indonesia pada table 1.1 tergolong tinggi dibandingkan pengeluaran pesta dan upacara adat lainnya. Pada data Pengeluaran pengeluaran pesta dan upacara perkawinan sebagian besar didorong oleh kompetisi setiap individu. Selain itu, perayaan perkawinan didorong oleh perbedaan kriteria yang lebih berkaitan dengan tampilan simbolik yaitu transfer. Hubungan antara nilai dari pesta dan upacara perkawinan termasuk mahar di dalamnya dan pembentukan modal manusia dianggap isu penting dalam pembangunan ekonomi (Anderson, 2007).

Beberapa literatur menyampaikan bahwa mas kawin atau transfer menjadi salah satu faktor penambah untuk pengeluaran pesta dan upacara perkawinan. Pemberlakuan mas kawin atau mahar bergantung pada negara masing-masing. Transaksi yang terjadi pada Maghreb dari awal abad pertengahan, suku Badui di Timur Tengah, dan negara-negara yang sebelumnya di bawah Kekaisaran Ottoman seperti Irak, Suriah, Mesir, Turki, Iran, Albania, dan Afganistan (Rapoport, 2000 ; Quale, 1988), dengan berdasarkan hukum Islam

bahwa sebuah perkawinan yang sah diperlukan suatu bentuk mahar (Bianquis, 1996). Di Pakistan terdapat sebagian masyarakat yang menggunakan sistem mas kawin, sebagian yang lain mengacu pada mahar (Anderson, 2000). Pada Cina klasik diperlukan negosiasi mahar untuk keabsahan perkawinan yang dibiayai berdasarkan porsi pengembalian mahar (Ebrey, 1993). Taiwan dengan bertukar pembayaran perkawinan di kedua arah (Paroki dan Willis, 1993). Negara-negara di Asia Tenggara, seperti Thailand, Indonesia, dan Burma sebagian besar hanya mentransfer brideprices (Cherlin dan Chamrathirong, 1988, Spiro, 1975). Di Afrika bride-price atau mahar adalah yang paling lazim digunakan yaitu sejumlah lebih dari 90 persen masyarakat sub-sahara tradisional. (Murdock, 1967 ; Goody, 1973). Di Bangladesh menggunakan probabilitas yang meningkat untuk membayar mas kawin atau mahar saat perkawinan (Anderson, 2007).

Setiap negara di seluruh dunia menetapkan mahar dalam bentuk yang berbeda. Misalnya di negara-negara barat pengantin dapat memberikan berlian mahal dan emas cincin. Arab menggunakan uang sebagai mahar, sedangkan Afrika menggunakan uang atau barang (Haag, dkk 2011). Menurut Kurniawan dan Samir (2019) beberapa suku di Indonesia, seperti Bugis dan Sumba, menggunakan bentuk besaran nilai uang dan barang yang disebut uang panai' di masyarakat Bugis dan belis' bagi masyarakat Sumba. Perbedaan bentuk di setiap daerah menjadikan mahar mempunyai nilai adat bagi masing-masing daerah. Oleh sebab itu, pada penelitian ini lebih berfokus pada pembahasan biaya yang terkait dengan pengeluaran bukan makanan yaitu pesta dan upacara perkawinan secara umum.

Pemberian mahar dan mas kawin tentunya mempunyai makna dan faktor yang mempengaruhi. Makna mahar di Afrika yaitu menawarkan perlindungan kepada istri untuk menstabilkan hubungan dan untuk menggabungkan kedua keluarga. (Haag, dkk 2011). Di Cina mahar berhubungan dengan pengembangan tatanan sosial yang lebih kompleks sehingga terjadi penekanan pada tingkat pendidikan. (Ebrey, 1993). Adanya praktik mahar cenderung diterima sebagai norma budaya. Dalam studi yang dilakukan oleh

Anderson (2007) menjelaskan bahwa pada masa sekarang jumlah mas kawin dipengaruhi oleh sistem kasta yang mempunyai makna mewakili sosial stratifikasi di India dan untuk masyarakat dengan suku yang lebih homogen di sub-Sahara Afrika pemberlakuan mahar. Studi Kurniawan dan Samir (2019) mahar di Indonesia memiliki makna hadiah perkawinan dan faktor yang memengaruhi nilai mahar di Indonesia adalah suku, agama, dan lokasi tempat tinggal. Adapun penelitian lain mengungkapkan bahwa di Indonesia nilai mahar cenderung dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang tinggi kepala rumah tangga dan calon pengantin. (Platteau dan Gaspart 2010).

Teori ekonomi menjelaskan bahwa setiap individu akan berusaha memaksimalkan utilitas untuk mencapai tingkat kepuasan maksimal. Becker (1973) mengemukakan alasan terjadinya perkawinan yaitu sebagai bentuk dorongan dari utilitas yaitu orang akan memilih untuk melakukan perkawinan dibandingkan hidup sendiri. Namun tentunya di balik peningkatan utilitas terdapat biaya yang dikeluarkan untuk mencapai kepuasan tersebut yaitu pengeluaran pesta dan upacara perkawinan. Pencapaian utilitas dapat terlaksana ketika individu yang akan melangsungkan perkawinan mempunyai modal yang cukup untuk mewujudkan perkawinan impian.

Kurniawan dan Samir (2019) dalam penelitiannya menjelaskan jika pesta perkawinan di Indonesia termasuk yang termahal dan termewah di dunia. Perkawinan di Indonesia memang erat kaitannya dengan adat istiadat yang secara turun temurun tetap dilestarikan hingga saat ini. Apalagi kompleksitas masyarakat Indonesia sangat beragam, mulai dari adat istiadat, prosesi perkawinan juga memiliki keunikan yang berbeda-beda karena setiap daerah memiliki julukan, tata cara, dan *ubarampe* (perlengkapan) tersendiri sesuai adat masing-masing. Hal ini turut berkontribusi pada perbedaan biaya pesta perkawinan antar wilayah. Pada dasarnya perkawinan dan ekonomi memiliki keterkaitan erat yaitu mengeksplorasi bagaimana perkawinan memengaruhi ekonomi dalam rumah tangga, barang-barang yang diperlukan dan tentunya biaya untuk melangsungkan perkawinan. (Grossbard dan Mincer, 2003).

Tingginya pengeluaran pesta dan upacara perkawinan di Indonesia juga menimbulkan beban ekonomi dan sosial kepada keluarga yang akan melangsungkan perkawinan. Hal ini dibuktikan pada studi yang dilakukan oleh Kurniawan dan Samir (2019) didukung dengan data susenas dalam kertas kerja IFLS east mengenai daerah yang terletak di bagian timur Indonesia yang cenderung mengadakan pesta perkawinan yang menghabiskan banyak biaya serta nilai mahar yang tinggi untuk keperluan prestise keluarga. Pada dasarnya dalam pasar perkawinan besarnya pesta perkawinan dan nilai mahar sangat ditentukan oleh faktor *endowment* masing-masing individu, jika ingin memenangkan persaingan dalam pasar perkawinan maka harus mampu meningkatkan kualitas diri. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis bagaimana pengeluaran pesta dan upacara perkawinan tersebut terbentuk serta menganalisisnya.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian mengenai *wedding expenditure* atau pengeluaran pesta dan upacara perkawinan banyak dilakukan di berbagai negara, namun di Indonesia penelitian mengenai perkawinan cenderung pada bagaimana mengatur rencana keuangan perkawinan. Dan beberapa penelitian lain menggambarkan perkawinan secara sosial. Dalam bidang ekonomi, dibutuhkan studi yang lebih komprehensif mengenai ekonomi perkawinan khususnya dalam proses pembentukan yang memerlukan banyak biaya yang harus dikeluarkan. Program sertifikasi pranikah yang akan dicanangkan pemerintah pada 2020, salah satu tujuannya adalah untuk menekan angka perceraian di Indonesia. Hal tersebut juga mendorong penulis dalam penelitian ini memasukkan variabel pengeluaran untuk jasa lembaga keuangan. Hasil analisis yang diperoleh pada penelitian ini diharapkan dapat merumuskan kebijakan literasi keuangan sebagai materi penting yang sangat diperlukan dalam sertifikasi pranikah dimana dalam proses perencanaannya memasukkan tema kesehatan dan agama.

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui dan menganalisis determinan pengeluaran untuk pesta dan upacara perkawinan di Indonesia berdasarkan Susenas 2016.

1.4 Kontribusi Riset

Hasil dari temuan ini diharapkan menjadi langkah dalam kontribusi kebijakan publik oleh pemerintah dalam merumuskan materi pentingnya literasi keuangan dalam sertifikasi pra-nikah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari lima bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis, model analisis, dan kerangka berpikir.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi tentang pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis.

BAB 4 : PEMBAHASAN

Bagian ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis model dan pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisi tentang simpulan dan saran.